

ISSN : 2443-2822

Jurnal **INTEGRASI**

Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Volume 1 Nomor 2, Agustus 2015



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

JURNAL INTEGRASI

Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil-hasil kajian analitis, penelitian, aplikasi teori dan pembahasan perpustakaan tentang Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari Ilmu Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Ekonomi serta ilmu Sosial lainnya yang ada di masyarakat. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarkan kajian Ilmu Pengetahuan Sosial sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah-masalah Ilmu Pengetahuan Sosial dan praktisi Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pimpinan Umum

Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum

Penyunting Pelaksana

Dr. Herman, S.Pd., M.Si

Dr. Patahuddin, M.Pd.,

Dr. Anwar Ramli, SE, M.Si.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si (UNM)

Prof. Dr. Heri Tahir, SH, MH (UNM)

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. M.Hum (UNM)

Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA, (UNHAS)

Prof. Hamdan Juhani, M.A, Ph.D. (UIN)

Prof. Dr. Chalik Imran Musa, M.Si (UNM)

Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si (UNM)

Pelaksana Tata Usaha

Rudi Salam, S.Pd., M.Pd.

Supardi Salam, S.Pd., M.Pd.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana UNM Gedung FIS UNM Lantai III Jl. Andi Pangeran Pettarani Gunung Sari Baru Makassar 90222. Tlp. 0411-885105 – 091342733458

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial UNM. Penanggung Jawab Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel dapat dilihat pada petunjuk bagi penulis di sampul bagian belakang dalam jurnal ini.

1. Analisis Penanaman Sikap Sosila pada Pembelajaran PKn kelas IV SD Inpres Tamalanrea I Makassar Abdul Azis	1 – 8
2. Pendekatan <i>DEEP Dialog and Critical Thinking</i> terhadap berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Siswa Abdul Saban.....	9 – 15
3. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Tipe STAD Adriani Abdullah	19 – 29
4. Pengaruh Renumerasi dan Kompetensi Terhadap kinerja Pegawai Pada pembina Administrasi Veteran dan Cadangan Komando Daerah Milliter VII Wirabuana Andi Hasrul Kadir	30 - 45
5. Efektivitas Model Cooperativ Learning Tipe Two Stay Two Stray Dalam Pembelajaran Sejarah Siswa Kelas X IPA SMAN 1 Lappariaja Kabupaten Bone Andi Misnawati	46 – 58
6. Hubungan Antara Kreativitas dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VII SMPN 2 Makassar Tahun Ajaran 2014/2015 Andi Mullati	59 – 67
7. Konflik AntarWarga di Desa Dandang Kabupaten Luwu Utara Armayanti Ahmad	68– 76
8. Pengaruh Praktek Kerja Industri (Prakterin) dan Lingkungan Keluarga terhaap Minat Berwirausaha pada SMKN 1 Watampone Kabupaten Bone Asniar	77 – 87
9. Analisis Kinerja Guru Tersertifikasi SDN Kompleks Sudirman Makassar Burhan	88 – 105
10. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Kliten Fiansi	106 - 117
11. Islamisasi Tayando Kota Tual Maluku (Pola Adaptasi Ritual dan Perkembangan Kelembagaa Islam) Jamaen Warwefubun	118 – 129
12. Dampak Politik colonial Belanda Terhadap Kekuasaan Sultan Muhammad Sirajuddin Dompu pada Tahun 1886 - 1934 Khusnul Khatima	130 – 148
13. Pengaruh Penempatan Karyawan dan Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Reski Laifasto Cabang Makassar Nurhaeli Ramli	149 – 150

14. Inklusi Sosial Komunitas Lesbi di Kota Makassar Rasmah Ahmad	160 – 167
15. Monopoli Perdagangan Cengkeh VOC di Ternate (1602 – 1799) Suharlín Ode Bau	168 – 179
16. Pengaruh Manajemen Sumber daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dahlan	180 – 187
17. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto Suriani L	188 – 199
18. Analisis Alokasi Pemanfaatan Faktor Produksi pada Tanaman Padi di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Andi Tenri Ampa	200 – 209
19. Eksistensi Pedagang Kaki Lima (Penjual Jagung) Tinjauan Sosiologis dan Yuridis di Kabupaten Takalar Nurhidayah	210 – 216
20. Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pembelajaran Praktik di Laboratorium Kampus Akademik Teknik Soroako (ATS) Hj. Musakirawati	217 – 229
21. Tanggapan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama Muh. Said	230– 235
22. Pengaruh Sistem Imbalan Terhadap Kinerja Guru di Kota Makassar Herman	236 – 246
23. Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geogstrategi Indonesia	247 - 257

URGENSI KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A. ACO AGUS¹

Abstrak: National Resilience is a dynamic condition of a nation that contains tenacity and resilience that contains the ability to develop national power in the face and overcome all threats, disturbances, obstacles and challenges (AGHT), both coming from outside or from within the country that directly or indirectly harm integrity, identity, nation's survival and struggle in pursuit of National Goal of Indonesia. Indonesia National Resilience viewed from astra gatra include: The natural aspect (tri gatra) that is the position and location of the geography of the state of Indonesia, the state of natural wealth, Condition of ability, population, social aspect (panca gatra) that is ideology, politics, economy, social culture, military / defense, challenge of national resilience, Indonesia's future geostrategy is that Indonesia is considered a regional power where its economy is not yet strong in international area of vulnerability to relations with other countries, border disputes, exclusive economic zone arrangements, Sea Lane Of Communication (SLOC) domination of natural resources, Wich contains and international dimension. The purpose of geosrtategy is directed to: upholding law and order, welfare and prosperity, defense and safety, legal justice and social justice, the availability of people's opportunity to actualize (Freedom of the People).

Keywords : National, Resilience, dynamic, condition

PENDAHULUAN

Ketahanan Nasional (*national resilience*) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa bangsa dan negara Indonesia sangat membutuhkan Ketahanan Nasional? Untuk menciptakan suatu *perceived power*, mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini, merupakan masa yang akan datang juga Ketahanan Nasional merupakan konsep kekuatan yang diharapkan memperkokoh Integrasi Nasional. Pada sisi lain ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHI) yang dihadapi bangsa Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi atau kondisi eksternal (konstelasi politik, keamanan, dan pola hubungan regional/internasional) internal (konstelasi politik dan keamanan dalam negeri) serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan jika bangsa Indonesia dapat menghadapinya dan mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapinya maka kemerdekaan, kedaulatan, identitas, integritas nasional dapat dipertahankan dan mampu membina kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

¹ Dosen PPKn FIS UNM

PEMBAHASAN

1) Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia

Istilah Ketahanan Nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi Ketahanan Nasional sampai sekarang ini. Suradinata (2005 : 47) mengemukakan pengertian Ketahanan Nasional suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Sedangkan Suryohadiprojo (1997) menyatakan Ketahanan Nasional meliputi kemandirian nasional dan kesejahteraan nasional yang berarti Ketahanan Nasional sejalan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu implementasi Ketahanan Nasional Indonesia dalam proses pembangunan nasional dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu pendekatan kemandirian digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam melindungi eksistensi serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa dan negara terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional itu dalam bentuk kemampuan bangsa dalam mengidentifikasi, membina, mengelola serta mengembangkan potensi dan kekuatan nasional menjadi kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara secara adil merata serta proporsional. Kedua pendekatan ini selalu digunakan secara bersama-sama dan pendekatan mana yang digunakan tergantung kepada kondisi serta situasi global (nasional, regional internasional) yang sedang atau akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Dalam perspektif makro Ketahanan Nasional merupakan derivasi dari pembangunan nasional dan keduanya mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualistik keberhasilan pembangunan nasional akan dapat meningkatkan Ketahanan Nasional dan sebaliknya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional. Hakekat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara. Hakekat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Model Alfred Thayer Mahan menjelaskan tentang konsepsi dasar Ketahanan Nasional sebagai kekuatan nasional suatu bangsa, yang dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan sifat pemerintahan. Ketahanan Nasional tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia adalah :

- Mandiri adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.
- Dinamis adalah berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategis.
- Wibawa adalah pembinaan Ketahanan Nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.

- Konsultasi dan kerjasama yaitu sikap konsultif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada akekuatan moral dan kepribadian bangsa.

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan serta utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dan negara untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Hakekat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakekat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang serasi dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional. Ketahanan Nasional atau disingkat Tannas menurut salah seorang ahli ketahanan nasional, GPH S. Suryomataraman (1980), definisi ketahanan nasional berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi (Himpunan Lemhanas, 1980).

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni :

1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin
2. Ketahanan nasional sebagai kondisi
3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan

Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi – pengertian pertama – perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan Nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra.” Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur. Apakah ketahanan nasional dalam pengertian pertama ini dapat dianggap sebagai doktrin? Dikatakan lanjut oleh GPH S. Suryomataraman (1980), bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi – pengertian kedua – sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni Asta Gatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebagai kondisi ini memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi – pengertian tiga – berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “survive” walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta

Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Perihal ada tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basrie (2002) bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut : 1) sebagai Kondisi, 2) sebagai Doktrin, dan 3) sebagai Metode. Tanas sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tanas sebagai doktrin berisi peraturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tanas sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser kearah nonfisik, antara lain : budaya dan kebangsaan (Sudradjat, 1996:1-2). Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi disegala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armawi, 2012:90). Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis, atau Ketahanan Berlapis yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).

2) Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat tiga cara pandang dalam melihat ketahanan. Ketiganya menghasilkan tiga wajah ketahanan nasional yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama “Ketahanan Nasional berlandaskan ajaran Asta Gatra.” Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang delapan unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asta Gatra. Pemikiran tentang Asta Gatra dikembangkan oleh Lemhanas. Bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur terdiri dari tiga unsur alamiah (tri gatra) dan lima unsur sosial (panca gatra). Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Morgenthau dalam bukunya *“Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace”* mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah (*dinamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence Seapoer an History*, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur: letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred T. Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia (Armawi, 2012). Cline dalam bukunya *World Power Assesment, A Calculus*

of Strategic Drift, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut : sinergi antara potensi demografi dengan geografi : kemampuan militer; kemampuan ekonomi; strategi nasional; dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi; kemampuan militer; dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang *tangible*, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan *intangible factors*. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar, dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula (Armawi, 2012 : 10).

3) Bela Negara sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam buku Pemasaryakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguhkan konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia dibidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada tanggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasoinal Indonesia. Berdasarkan Pasl 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam undang-undang NO. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.” Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah *sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara*. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik yaitu dengan cara “memanggul senjata” menghadapi serangan atau agresinya musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non fisik dapat didefinisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara nonmiliter. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat

militer tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter. Yang dimaksud ancaman adalah “setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.” Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

a. Ketahanan dibidang ideologi

Ketahanan Nasional dalam bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsung hidup dan eksistensi Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, terutama pengaruh komunisme, liberalisme dan fundamentalisme dan fanatisme agama yang terlalu inklusif, Rifdan, 2002. Pancasila mengandung nilai-nilai kralisasi yang diterima oleh seluruh lapisan dan unsur masyarakat yang heterogen, dan dijadikan sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus sebagai fundamental idea dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada sisi lain, struktur masyarakat Indonesia yang sangat heterogen sangat rawan konflik (struktural dan horizontal), dan setiap saat dapat mengancam integritas (keutuhan) bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena kita harus terus memupuk sikap nasionalisme dan dengan penuh kesadaran mengeliminasi sikap dan pandangan yang terlalu nepotis dan fanatis keagamaan, Rifdan, 2003. Ancaman potensial yang mempengaruhi ketahanan nasional dibidang ideologi ke depan adalah : infiltrasi komunis dalam lembaga-lembaga negara dengan pola, konsep dan doktrin baru, fanatisme agama yang berlebihan, serta infiltrasi pemikiran sekularisme-liberalisme dengan pola-pola modernitas.

b. Ketahanan dibidang Politik

Kita telah mengenal dan mempraktekkan beberapa sistem politik, yaitu sistem demokrasi liberal yang mengakibatkan dominasi partai-partai politik, dan kemudian sistem demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pemerintahan otoriter. Penerapan kedua sistem demokrasi ini berdampak pada distabilisasi kehidupan sosial politik, lemahnya ketahanan politi, mandeknya proses pembangunan nasional, serta terjadinya berbagai penyelewengan dalam penyelenggaraan negara. Berbagai tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi politik ke depan dan sangat mempengaruhi keamanan nasional dibidang politik adalah; penegakkan supremasi hukum dan HAM, penegakkan pemerintaha demokratis yang bebas dari KKN, serta membangun kecakapna dan kecerdasan di seluruh lapisan masyarakat. Di era reformasi politik ini, sudah seharusnya bangsa Indonesia mengembangkan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen sehingga mendukung ketahanan nasional dibidang politik. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari/dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Ini berarti bahwa didalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, menjunjung tinggi kemanusia sesuai dengan martabat manusia, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan kerakyatan berdasarkan konsep atau model permusyawaratan/perwakilan, sekaligus memanfaatkannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

c. Ketahanan dibidang Ekonomi

Ketahanan dibidang ekonomi merupakan mata rantai terlemah diantara mata-mata rantai ketahanan yang secara keseluruhan merupakan ketahanan nasional Indonesia. Pembangunan nasional niscaya diarahkan kepada upaya mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep, strategi dan implementasi pembangunan ekonomi Indonesia harus mampu mewujudkan ketahanan nasional dibidang ekonomi pembangunan nasional sedapat mungkin struktur ekonomi, sehingga : (1) produksi yang berasal dari sektor pertanian bertambah besar, (2) warga negara atau penduduk yang hidup dari luar sektor pertanian bertambah besar, dan (3) bahan eksport semakin banyak terdiri dari barang-barang olahan dan barang-barang jadi. Tantangan terberat yang kita hadapi ke depan dan sangat mempengaruhi ketahanan nasional dibidang ekonomi adalah ; pengaruh globalisasi ekonomi (regional dan internasional), persaingan pasar bebas, serta perkembangan kapitalisme modern.

d. Ketahanan dibidang Sosial Budaya

Bidang sosial budaya mencakup; pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi dan lain-lain, namun yang menonjol disini adalah faktor teknologi dan kebudayaan, karena perubahan dibidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaruh dari luar negeri paling banyak menimbulkan perubahan. Untuk itu bangsa Indonesia perlu mawas diri dan waspada, karena kemungkinannya pihak luar sengaja menyebar pengaruhnya dengan tujuan untuk melakukan intervensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan distabilisasi kehidupan nasional dibidang sosial budaya. Persoalan yang sangat mendesak untuk kita pecahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional dibidang sosial budaya antara lain adalah : bagaimana mengarahkan perubahan sosial budaya itu ke arah integrasi sosial budaya, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial budaya, suku bangsa, etnik dan agama atau kepercayaan terhadap TYME. Pemerintah Indonesia harus menyadari eksistensi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, dan ancaman potensial yang mempengaruhi ketahanan nasional dibidang sosial budaya bahkan integrasi nasional adalah ; konflik horizontal yang dipicu oleh sentimen sosial-ekonomi, suku, agama, serta bangkitnya etnisitas (kesukubangsaan) yang berakibat pada upaya pemisahan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rifdan, 2002.

e. Ketahanan dibidang Hankam

Mengingat bahwa ruang lingkup pertahanan negara meliputi seluruh bidang kehidupan nasional, dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 (3) dan Pasal 30 (1), serta UU No. 3 Tahun 2002 Pasal (8 dan 9), maka sudah sewajarnya mulai sekarang dipikirkan konsep, model, dan asas demokrasi dalam pembelaan negara Indonesia. Jika ini sudah terlaksana, maka ketahanan nasional dibidang pertahanan keamanan akan semakin mantap. Bela negara tidak hanya tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh unsur, elemen, dan lapisan masyarakat Indonesia. Pada skala makro, upaya pembelaan negara harus melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional seperti ; warga negara (penduduk), kekayaan alam, dan teknologi. Upaya pembelaan negara harus dilakukan oleh warga negara sesuai dengan bidang kemampuan,

dan profesi masing-masing warga negara. Pelaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional Indonesia menggunakan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dimana seluruh rakyat diikuti sertakan dengan profesinya masing-masing, dan apabila Sishankamrata ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, niscaya mewujudkan ketahanan yang kokoh kuat dibidang pertahanan keamanan. Dibidang pertahanan dikendalikan dan dilaksanakan oleh TNI dengan tugas utama (UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7); menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan mengkaji konstelasi politik dan pola hubungan antara bangsa saat ini, maka ke depan, kemungkinan ancaman yang harus diwaspadai oleh bangsa dan negara Indonesia, antara lain : intervensi, infiltrasi, agresi/invasi militer, teroris dan bahkan ekspansi wilayah. Bidang keamanan dikendalikan dan dilaksanakan oleh POLRI dengan tugas utama (UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13); memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini sekaligus menjadi tantangan berat bagi Aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di masa depan, dan harus dibuktikan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi kesempatan untuk memperbaiki citra Polri. Tantangan berat lain yang diemban oleh Aparat Kepolisian dalam menjalankan tugas di masa depan adalah penegakan supremasi hukum/HAM, pemberantasan KKN serta penanganan berbagai konflik horizontal (terutama yang bermotif SARA) yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, Rifdan, 2003.

4) Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 – 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya individu yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan dan dinamika yang terus meneru. Ketahanan Nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi – salah satu wajah Tannas – akan selalu mewujudkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada dimasyarakat kita. M. Erwin (2012 : 212) mengemukakan : masalah pokok pertama dan ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan *power concept* dan bertujuan menciptakan kondisi “penguasaan” dan “dominasi”. Lalu permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang “simetris” dengan negara-negara lain. Hubungan simetris ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi kerjasama saling menguntungkan dan saling menghormati, dalam arti “duduk sama rata dan tegak sama tinggi”. Dalam kenyataan, tipe hubungan simetris ini sulit dilaksanakan terutama dalam interaksi dengan negara-negara maju. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hubungan itu pada umumnya bersifat *asymetris*. Indonesia dianggap hanya berpotensi sebagai negara menengah atau kekuatan “regional” dimana ekonominya belum begitu kuat dalam percaturan internasional. Indonesia dianggap sebagai negara *phery-phery* dalam sistem politik internasional yang dikuasai negara ini dalam hal ini Amerika Serikat. Selain itu permasalahan ketahanan nasional Indonesia terletak pada masalah sengketa perbatasan,

pengaturan zona ekonomi eksklusif, *Sea Lane of Communication (SLOC)*, penguasaan sumber kekayaan alam, maupun pengaturan fasilitas atau sarana perdagangan yang mengandung dimensi kepentingan internasional.

5) Pengertian Geostrategi

Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, sebuah bangsa memerlukan pemahaman tentang geopolitik dan perlu mengimplemtasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi dari geopolitik memerlukan sebuah strategi/cara/metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Implementasi geopolitik ini disebut dengan geostrategi. Secara konsep, Geostrategi berasal dari bahasa Yunan, yaitu “goes” yang berarti ruang/wilayah (geografi) dan “strategos” yang berarti strategi/cara/metode. Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2007 : 143), geostrategi dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Menurut penulis sendiri, secara lebih singkat dan merujuk pada istilah geostrategi sebelumnya, maka geostrategi dapat dikatakan merupakan “cara/strategi dalam memanfaatkan konstelasi/kondisi geografis (wilayah) untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana negara dalam rangka menentukan tujuan nasional dan tujuan politik.” Teori tentang geostrategy continental yang dikembangkan oleh Sir Balford Mackinder (1861-1945) seorang guru besar geostrategi dari Universitas London saat ini digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang di dunia (Ermaya Suradinata, 2005:10). Sementara ini di Indonesia, geostrategi Indonesia dikatakan sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007:145). Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa geostrategi Indonesia diperlukan dalam rangka mempertahankan integritas bangsa mengingat kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat rawan dengan terjadinya disitegrasi. Menurut Heri Herdiawanto dan Jumanta (2010:138), tujuan geostrategi diarahkan untuk :

- a. Menegakkan hukum dan ketertiban (law and order).
- b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity)
- c. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defense and safety)
- d. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (juridical justice and social justice).
- e. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (freedom of the people).

Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam rumusan Ketahanan Nasional (Tannas). Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power (kekuatan nasional). Teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans. J. Morgenthau dalam bukunya *Politic Among Nation* menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai “*The Elements of National Powers*” yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan, posisi strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Asta Gatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Asta Gatra.

Herdiawanto dan Jumanta (2010 : 138) yang menyatakan bahwa geostrategi Indonesia (yang diwujudkan dalam konsep Ketahanan Nasional Indonesia) memiliki dua sifat pokok, yaitu :

- a. Bersifat daya tangkal, dimana sifat ini berupaya untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
- b. Bersifat developmental/pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan dalam mengejar Tujuan Nasional Indonesia. Ketahanan Nasional Indonesia ditinjau dari aspek alamiah (tri gatra) yaitu posisi dan lokasi geografi negara Indonesia, keadaan kekayaan alam, keadaan kemampuan, penduduk, aspek sosial (panca gatra) yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer/Hankam, Tantangan Ketahanan Nasional. Geostrategi Indonesia ke depan adalah Indonesia dianggap sebagai kekuatan regional dimana ekonominya belum begitu kuat dalam percaturan internasional kerawanan hubungan dengan negara-negara lain, sengketa perbatasan, pengaturan zona ekonomi eksklusif, *Sea Lane Of Communication* (SLOC) penguasaan sumber kekayaan alam, pengaturan dan sarana perdagangan yang mengandung dimensi internasional. Tujuan geostrategi diarahkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*), terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*defense and safety*), terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*). Geostrategi memiliki dua sifat pokok, yaitu bersifat daya tangkal, dimana sifat ini berupaya untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, dan bersifat developmental/pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul & Armaidly, 1998, Sumbangsi Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press.
- Armawi, 2012, Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa, Makalah disajikan dalam Workshop Pendidikan Karakter Bagi Dosen PKN di Perguruan Tinggi Tgl. 31 Agustus – 2 September 2012, Jakarta.
- Basrie C, 2002, Konsep Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Kapitaselekta PKN Bagian I, Jakarta, Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Dirjen Dikti, Depdikbud.
- Erwin. M, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Haryomataram, GPH, S, 1980, Mengenal Tiga Wajah Ketahanan Nasional dalam Bunga Rampai Ketahanan Nasional oleh Himpunan Lemhanas Jakarta, PT. Rippers Utama.

- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta : Erlangga.
- Juliardi, Budi, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Paradigma
- Panitia Lemhanas, 1980, *Bunga Rampai Ketahanan Nasional Konsepsi dan Teori*, Jakarta, PT. Ripers Utama.
- Rahayu Sari Ani, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rifdan, 2003, *Upaya Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia* diterbitkan oleh Jurnal IKHTIYAR, UPT MKU UNM ISSN 1412-8535 Vol. 2 No. 2, Agustus 2003.
- Soenardi, R.M, 1997, *Teori Ketahanan Nasional*, Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional (HASTANAS), Cet.1, Jakarta.
- Sudrajat, Edi, *Ketahanan Nasional sebagai Kekuatan Penangkal*, Suatu Tinjauan dari Sudutu Kepentingan Hankam, Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Suradinata, Ermaya, 2001, *Geopoliti dan Geostategik Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ketahanan Nasional No. VI Agustus 2001.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 1997, *Ketahanan Nasional Indonesia*, Jurnal Ketahanan Nasional No. II 1 April 1997 Program Studi Ketahanan Nasional, PTS UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara.